



RISALAH RESMI

- Tahun : 2019
- Jenis Rapat : Rapat Paripurna
- Sifat Rapat : Terbuka
- Hari / Tanggal : Rabu, 27 November 2019
- Pukul : 09.00 Wib s/d Selesai
- Tempat : Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Kabupaten Bungo
- Pimpinan Rapat : JUMIWAN AGUZA/ Wakil Ketua DPRD
- Didampingi:
- Acara : Paripurna Penyampaian Nota Pengantar Bupati Bungo atas Ranperda APBD Tahun Anggaran 2020 dan Ranperda lainnya
- Sekretaris Rapat : Dra. Ulfa Novriza, M.Si/ Sekretaris DPRD
- Hadir : A. 28 dari 35 orang Anggota DPRD, dengan rincian:
- 1. Fraksi Gerindra**
3 dari 4 orang Anggota
 - 2. Fraksi Nasdem**
4 dari 5 orang Anggota
 - 3 Fraksi PAN**
3 dari 4 orang Anggota
 - 4. Fraksi PKS**
4 dari 4 orang Anggota
 - 5. Fraksi Demokrat**
2 dari 3 orang Anggota
 - 6. Fraksi Hanura**
3 dari 3 orang Anggota

7. Fraksi PDI-Pejuangan

0 dari 3 orang Anggota

8. Fraksi PKB

3 dari 3 orang Anggota

9. Fraksi Pembangunan Berkarya

4 dari 4 orang Anggota

10. Fraksi Karya Bintang Indonesia

3 dari 3 orang Anggota

Izin : 4 Orang

B. Sekretariat DPRD :

1. Agus Kusnandar, SH / Kabag Persidangan dan Per-UU
2. Indra Yani, S.Pd. MM / Kabag Umum dan Keuangan
3. Usman, S.Pd / Kabag Fasilitasi, Penganggaran dan Pengawasan
4. Melliyantikasari, SH/ Kasubbag Kerjasama dan Aspirasi
5. Irayana, SH / Kasubbag Persidangan dan Risalah
6. Rizamsir, SH / Humas Protokol dan Publikasi
7. M. Marhabi

- Turut Hadir :
1. Bupati Bungo
 2. Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bungo
 3. Para Staf Ahli Bupati Bungo, Para Asisten Sekda, dan Kepala Bagian dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo;
 4. Kepala OPD dan Pimpinan BUMD/BUMN dalam Kab. Bungo;
 5. Pimpinan Perguruan Tinggi dalam Kabupaten Bungo
 7. Para Camat dan Lurah dalam kabupaten Bungo;
 8. Rekan-rekan Wartawan

Pembawa Acara : Fitri Verawati / Staf Sekretariat DPRD

Jalannya Rapat : Acara diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri / hadirin dipersilahkan duduk kembali.

Rapat hari ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bungo.

Kepada Bapak Jumiwan Aguza, SM disilahkan dengan segala hormat;

Pimpinan Rapat : Jumiwan Aguza/ Wakil Ketua DPRD Kab. Bungo
(Rapat di buka pukul 10.00 Wib)

Bismillahirrahmaanirrahiim. Asslamu'alaikum Wr. Wb.

Selamat pagi dan Salam Sejahtera untuk kita semua.

Sebelum Rapat Paripurna hari ini saya buka, diminta kepada Saudari Sekretaris Dewan untuk membacakan daftar hadir Anggota Dewan. Kepada Saudari Sekwan dipersilahkan.

---Sekwan membacakan daftar hadir ---

Sesuai dengan laporan Sekretaris DPRD tadi bahwa dari jumlah 35 orang Anggota Dewan, yang hadir secara fisik dan telah menandatangani daftar hadir berjumlah 28 orang, maka untuk pelaksanaan paripurna Penyampaian Nota Pengantar Bupati Bungo atas Ranperda APBD Tahun Anggaran 2020 dan Ranperda lainnya, berlaku ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (c) Peraturan DPRD Kabupaten Bungo Nomor 1 Tahun 2018, yaitu dihadiri oleh lebih dari 1/2 (setengah) jumlah anggota. Dengan demikian quorum telah tercapai dan rapat paripurna hari ini dapat dilanjutkan.

Dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirohhiim Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bungo dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar Bupati Bungo atas Ranperda APBD Tahun Anggaran 2020 dan Ranperda lainnya, secara resmi dibuka dan terbuka untuk umum.

---- ketukan palu tiga kali ----

Yth. Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat.

Yth. Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.

Yth. Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo dan
Ketua Pengadilan Agama Muara Bungo.

Yth. Saudara Sekda, Staf Ahli Bupati, Asisten dan
Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten
Bungo.

Yth. Saudara Kepala Perangkat Daerah, Kepala
Instansi Vertikal, dalam Kabupaten Bungo,
Kepala BUMN, BUMD.

Sdr. Camat se Kabupaten Bungo dan Lurah dalam
Kota Muara Bungo

Pimpinan DPRD, Bupati dan Wakil Bupati serta hadirin yang
berbahagia.

Pada kesempatan yang baik ini Marilah kita bersama-sama
memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha
Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberi
kesehatan dan kesempatan, untuk hadir Bersama diruangan ini untuk
melaksanakan Rapat Paripurna DPRD. Semoga yang kita laksanakan
hari ini membawa berkah bagi kita dan masyarakat Kabupaten Bungo
pada umumnya. Amin ya robbal Alamin.

Sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi
besar Muhammad S.A.W, semoga kita mendapatkan safa'atnya di
Yaumil mahsyar.

Saudara Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia

Pelaksanaan Rapat Paripurna ini diselenggarakan sebagai bentuk perwujudan pelaksanaan fungsi anggaran DPRD sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota yang menentukan "Fungsi Anggaran DPRD diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap Rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Kepala Daerah". Sejalan dengan ketentuan tersebut, Pasal 17 ayat (1) PP 12 Tahun 2018 mengamanatkan bahwa "Pembahasan Ranperda tentang APBD dilaksanakan oleh DPRD dan Kepala Daerah setelah Kepala Daerah menyampaikan Ranperda APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung.

Pimpinan DPRD, Bupati dan Wakil Bupati serta hadirin yang berbahagia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 16 PP 12 Tahun 2018, DPRD dan Kepala Daerah telah melaksanakan pembahasan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran atau yang lebih dikenal dengan istilah KUA dan PPAS. Bagi Anggota DPRD, khususnya Anggota Badan Anggaran pembahasan KUA dan PPAS merupakan momentum penting untuk memperjuangkan aspirasi dan Pokok-Pokok Pikiran masyarakat yang salah satunya bersumber dari hasil pelaksanaan Reses, rapat kerja dan rapat dengar pendapat yang telah dilakukan oleh Anggota DPRD secara perseorangan maupun secara kolektif melalui alat kelengkapan DPRD.

Sesuai dengan Tata Tertib DPRD Nomor 1 Tahun 2018 mengamanatkan bahwa sebelum disahkan menjadi Perda APBD Tahun Anggaran 2020 terdapat tahapan-tahapan yang harus kita lalui yaitu Penyampaian Nota Pengantar Bupati Bungo Tentang Ranperda APBD Tahun Anggaran 2020 yang pada hari ini juga sekaligus disampaikan Nota Pengantar Bupati atas Ranperda Perubahan atas

Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Ranperda tentang Penyelenggaraan Perpustakaan.

Tahapan selanjutnya adalah rapat kerja penyampaian pandangan umum Fraksi DPRD terhadap Nota Pengantar Bupati dan rapat kerja tentang jawaban pemerintah Daerah atas pandangan umum fraksi DPRD terhadap Nota Pengantar Bupati atas Ranperda tersebut. Kemudian yang terakhir adalah Paripurna Penyampaian Kata Akhir Fraksi DPRD Kabupaten Bungo terhadap Ranperda APBD TA. 2020 dan Ranperda lainnya.

Saudara Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia.

Selanjutnya mari kita dengarkan dan simak bersama Nota Pengantar Bupati Bungo tentang Ranperda APBD Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2020 dan Ranperda lainnya.

____ **Kepada Saudara Bupati waktu dan tempat kami persilahkan** ____

Pimpinan Rapat : Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat Siang dan Salam Sejahtera bagi Kita Semua,

Yang Terhormat :

- Sdr. Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bungo;
- Rekan-rekan Anggota Forkompinda, Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama Muara Bungo;
- Sdr. Wakil Bupati Bungo
- Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo, Para Staf Ahli, Asisten, dan Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo;
- Kepala Kantor Kementerian Agama, Ketua Lembaga Adat Melayu, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bungo, dan Para Pimpinan Perguruan Tinggi dalam Kabupaten Bungo;
- Para Camat, Lurah dan hadirin yang berbagai

Singkat kato;

Kecik Benamo, Gedang Begelar,
Nan kecik idak disebut namonyo,
Nan gedang idak diimbau gelarnyo.

Mengawali pengantar Nota Keuangan ini, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat hadir di ruangan ini dalam rangka rapat paripurna dewan, dengan agenda Penyampaian Nota Pengantar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2020.

Selanjutnya, sholawat teriring salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW. Semoga memperoleh syafaat beliau di Yaumul Makhshyar kelak. Aamiin.

Pimpinan dan Anggota Dewan Yang Terhormat, serta hadirin yang berbahagia.

Sebagaimana diketahui bersama, bahwa penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD TA. 2020 ini merupakan bagian dari rangkaian siklus pengelolaan keuangan daerah. Beberapa waktu lalu, kita telah melewati siklus Perubahan APBD TA 2019, dan tidak berapa lama lagi pelaksanaan APBD TA 2019 itu akan berakhir, tepatnya pada 31 Desember 2019. Dengan demikian, perencanaan anggaran yang termuat dalam RAPBD TA 2020 ini tidak terlepas dari perencanaan anggaran TA 2019 berikut pelaksanaannya, dikarenakan saling berkesinambungan dalam mata rantai siklus pengelolaan keuangan daerah.

Kembali pada agenda kita kali ini, dapat disampaikan, bahwa belum lama ini telah ditandatangani Nota Kesepakatan Terhadap Kebijakan Umum Anggaran (KUA) sekaligus Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2020. Dimana KUA dan PPAS dimaksud disusun berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2020. Berikutnya, berdasarkan Nota Kesepakatan tersebut, telah diformulasikan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) TA 2020 masing-masing perangkat daerah, dan secara akumulasi termuat dalam RAPBD TA 2020, yang saat ini tengah diagendakan dalam forum rapat paripurna dewan yang terhormat.

Pimpinan dan Anggota Dewan Yang Terhormat, serta hadirin yang berbahagia

Berdasarkan formulasi yang telah dilakukan tersebut di atas, mengacu pada ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan berpedoman pada Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2020, maka postur anggaran yang termuat dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020, dapat disampaikan secara garis besar sebagai berikut :

1. Anggaran Pendapatan Daerah direncanakan sejumlah Rp1,84 Triliun lebih;
2. Anggaran Belanja Daerah direncanakan sejumlah Rp1,83 Triliun lebih;

Berdasarkan data tersebut, maka Selisih Anggaran sejumlah Rp2 Milyar, yang merupakan selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dikurangi Anggaran Belanja Daerah. Selisih tersebut digunakan untuk membiayai penyertaan modal pada PDAM Pancuran Telago Muara Bungo.

Anggaran pendapatan daerah tersebut di atas, secara garis besar terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah direncanakan sejumlah Rp152,98 Milyar lebih atau 8,30% dari total anggaran pendapatan daerah. Apabila dibandingkan dengan Perubahan APBD TA 2019 terdapat penurunan sebesar Rp33,27 Milyar lebih atau 17,87%;
2. Dana Perimbangan direncanakan sejumlah Rp942,19 Milyar lebih atau 51,15% dari total anggaran pendapatan daerah. Apabila dibandingkan dengan Perubahan APBD TA 2019 terdapat penurunan sebesar Rp169,39 Milyar lebih atau 15,24%;
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah direncanakan sejumlah Rp746,70 Milyar atau 40,54% dari total anggaran pendapatan daerah. Apabila dibandingkan dengan Perubahan APBD TA 2019 terdapat peningkatan sebesar Rp 478,04 Milyar lebih atau 177,94%.

Berikutnya anggaran belanja daerah, meliputi anggaran belanja tidak langsung sejumlah Rp1,06 Triliun lebih dan anggaran belanja langsung Rp771,13 Milyar lebih, dimana anggaran belanja tidak langsung memperoleh porsi terbesar yakni 58,08% sedangkan anggaran belanja langsung sebesar 41,91%, dari total anggaran belanja daerah. Apabila dibandingkan dengan Perubahan APBD TA 2019, maka anggaran belanja tidak langsung terdapat peningkatan sebesar Rp245,34 Milyar lebih atau 29,80%, sedangkan anggaran belanja langsung terdapat penurunan sebesar Rp30,71 Milyar lebih atau 3,95%.

Pimpinan dan Anggota Dewan Yang Terhormat, serta hadirin yang berbahagia.

Dari struktur RAPBD TA 2020 tersebut di atas, terdapat beberapa point penting secara umum dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Dalam anggaran pendapatan daerah, tercatat sejumlah Rp129,94 Milyar lebih. yang merupakan pendapatan daerah dengan kategori tidak melalui rekening kas umum daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yakni Pendapatan BLUD RSUD sejumlah Rp76,32 Milyar lebih, Pendapatan dana Kapitasi JKN sejumlah Rp11,54 Milyar lebih, dan Pendapatan Hibah Dana BOS pendidikan dasar sejumlah Rp42,07 Milyar lebih
2. Anggaran Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp 192,30 Milyar lebih, terdapat alokasi untuk pembayaran utang yang merupakan kewajiban daerah akibat tunda bayar atas pelaksanaan anggaran belanja di tahun 2019 dengan estimasi sebesar Rp177 Milyar lebih, selanjutnya alokasi untuk Silpa Mengikat sebesar Rp4,441 Milyar lebih, alokasi untuk DID sebesar Rp6,013 yang belum ada Belanjanya, dan Dana cadangan pembentukan Dinas Kominfo sebesar Rp3,559 Milyar lebih. Mengingat pelaksanaan APBD TA 2019 masih terus berjalan hingga akhir Desember 2019, maka kewajiban daerah dimaksud belum dapat ditentukan, sehingga dalam RAPBD TA 2020 ini untuk sementara dialokasikan dalam anggaran Belanja Tidak Terduga. Melalui mekanisme penggeseran anggaran belanja mendahului Perubahan APBD TA 2020, perhitungan final atas pembayaran utang dimaksud yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati, untuk selanjutnya

diformulasikan ke dalam anggaran belanja berkenaan dalam DPPA perangkat daerah.

3. Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan PNS sejumlah Rp102,885 Miliar lebih untuk sementara dialokasikan dalam rincian obyek belanja TPP Berdasarkan Beban Kerja. Hal ini dikarenakan terdapat kebijakan baru yang diberlakukan mulai tahun 2020 terkait dengan pemberian TPP yang wajib dilaksanakan berdasarkan Kepmendagri Nomor 061-5449 Tahun 2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap TPP Di Lingkungan Pemerintah Daerah tertanggal 31 Oktober 2019. Pelaksanaan lebih lanjut atas Kepmendagri tersebut hingga saat ini masih terus berjalan, dan akhirnya saat telah diterbitkannya persetujuan Menteri Dalam Negeri atas Ranperbup yang mengatur TPP. Dalam rangka pembayaran TPP dimaksud, maka ditempuh mekanisme penggeseran anggaran belanja mendahului Perubahan APBD TA 2020 seperti halnya anggaran Belanja Tidak Terduga.
4. Mekanisme penggeseran anggaran belanja mendahului Perubahan APBD TA 2020 juga akan dilakukan terhadap program/kegiatan tertentu yang hingga saat ini masih terus berproses sesuai tahapan yang diatur dalam juknis DAK dan juknis sejenis lainnya.

Pimpinan dan Anggota Dewan Yang Terhormat, serta hadirin yang berbahagia

Pada kesempatan ini, juga kami sampaikan dua Rancangan Peraturan Daerah untuk dibahas dan disetujui bersama menjadi Peraturan Daerah yaitu :

1. Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah terdiri dari :
 - 1) Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Komunikasi, Informasi dan Persandian.
 - 2) Peningkatan type perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Dusun, dari type C menjadi type B.
2. Ranperda tentang Penyelenggaraan Perpustakaan.

Demikianlah gambaran umum mengenai rancangan Peraturan Daerah tentang APBD TA 2020. Merujuk pada ketentuan Pasal 106 Peraturan

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, hendaknya diperoleh persetujuan bersama dalam rapat paripurna terakhir sesuai jadwal yang telah ditetapkan, yakni 30 November 2019.

Akhirnya, pada kesempatan yang berbahagia ini, perlu disampaikan pula kepada Anggota Dewan Yang Terhormat, sekiranya dibutuhkan penjelasan dan tambahan informasi berkenaan dengan penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ini termasuk dua ranperda lainnya, dipersilakan untuk mengundang OPD terkait diantaranya melalui forum Rapat Dengar Pendapat. Sebaliknya, Tim Anggaran Pemerintah Daerah bersama seluruh Kepala OPD telah diinstruksikan agar senantiasa siap untuk memberikan penjelasan maupun klarifikasi. Dengan demikian, diharapkan pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD TA 2020 ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya, sesuai kato adat **bulek aek dek pembuluh, bulek kato dek mufakat**.

Untuk itu, ke depan hendaknya kita selalu **Langkah Serentak Limbai Seayun**, sesuai semboyan kito bersamo. Semua itu tidak lain untuk kemajuan Kabupaten Bungo, dan demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bungo, dalam bingkai **Bungo Maju dan Sejahtera**, sesuai pantun berikut ini.

Ikan Patin Ikan Semah
Enak Digulai Dengan Asam Jawo
Mari Bersamo Satukan Langkah
Demi Memajukan Kabupaten Bungo

Demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Atas segala kekurangannya kami mohon maaf, serta atas segala perhatiannya tidak lupa kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah SWT meridhoi usaha dan kerja keras kita bersama.

Wabiillahi Taufik Walhidayah,

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Terima kasih kepada Bupati Bungo yang telah menyampaikan Nota Pengantar Bupati Bungo tentang Ranperda APBD Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2020.

----- Acara Selanjutnya dikembalikan kepada Pembawa acara -----

Terima kasih kepada Bupati Bungo yang telah menyampaikan Nota Pengantar Bupati Bungo tentang Ranperda APBD Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2020.

----- Acara Selanjutnya dikembalikan kepada Pembawa acara -----

--- penyerahan Nota Pengantar dari Bupati kepada DPRD ---

Saudara Bupati, Wakil Bupati yang kami banggakan, Anggota Dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia.

Pada kesempatan ini kami mengajak kita semua untuk memberikan dukungan kepada Pemerintah Daerah agar dapat memenuhi target rencana penerimaan yang disusun dan merealisasikan program dan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Saudara Bupati, Wakil Bupati yang kami banggakan, Anggota Dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia.

Bupati Bungo: H. MASHURI, SP, ME

Assalamualaikum Wr Wb, Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua.

- Yth. Sdr. Ketua, Wakil Ketua dan seluruh Anggota DPRD Kabupaten Bungo;

- Yth. segenap anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo dan Ketua Pengadilan Agama Muara Bungo;
- Sdr. Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten dan seluruh Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo;
- Para hadirin dan undangan yang berbahagia.

Kecik Benamo, Gedang Begelar,
 Nan kecik idak disebut namonyo,
 Nan gedang idak diimbau gelarnyo.

Mengawali sambutan ini, marilah kita memanjatkan puji dan rasa syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan dan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita diberikan kesehatan untuk hadir di ruangan ini, dalam rangka Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bungo, dengan agenda **Penyampaian Pengantar Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2019.**

Selanjutnya, shalawat teriring salam marilah senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia ke alam yang terang benderang, penuh dengan khasanah ilmu pengetahuan, sebagaimana kita rasakan saat ini.

Pimpinan dan Anggota Dewan Yang Terhormat, serta hadirin yang berbahagia.

Sebagaimana diketahui bersama, bahwa penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA. 2019 ini merupakan bagian dari rangkaian siklus pengelolaan keuangan daerah. Beberapa waktu lalu, kita telah melewati siklus Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2018, dan telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Berbeda dengan periode sebelumnya, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2018 tersebut, yang merupakan hasil dari pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Jambi, dengan perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Perolehan opini WTP ini merupakan yang pertama kali, sejak dilakukannya pemeriksaan oleh BPK atas LKPD TA 2004. Seiring dengan itu, sehari yang lalu telah terbit surat Menteri Keuangan Nomor S-702/MK.07/2019 tanggal 24 September 2019 perihal Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020, yang ternyata opini WTP tersebut membuahkan hasil berupa alokasi Dana Insentif Daerah (DID) untuk TA 2020 sebesar **Rp10,4 Milyar lebih**. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita syukuri bersama, dan tentunya menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di masa yang akan datang.

Pimpinan dan Anggota Dewan Yang Terhormat, serta hadirin yang berbahagia.

Kembali pada agenda kita kali ini, dapat disampaikan, bahwa Rapat Paripurna hari ini dan dilanjutkan dengan Rapat Paripurna berikutnya, merupakan bagian dari serangkaian mekanisme Perubahan APBD. Menurut ketentuan Pasal 316 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, lebih lanjut diperjelas oleh Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Permendagri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA. 2019, terdapat lima kondisi yang melatarbelakangi Perubahan APBD, yakni :

- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;

- c. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan;
- d. keadaan darurat; dan/atau
- e. keadaan luar biasa.

Merujuk pada aturan tersebut, beberapa waktu yang lalu, tepatnya tanggal 16 Agustus 2019, telah dilakukan penandatanganan Nota Kesepakatan antara Bupati Bungo dengan DPRD Kabupaten Bungo tentang Kebijakan Umum Perubahan APBD TA 2019. Seiring dengan itu, sesuai Berita Acara yang ditandatangani oleh Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bungo tertanggal 16 Agustus 2019, disepakati bahwa penambahan murni atas anggaran belanja langsung adalah sejumlah **Rp3,85 Milyar lebih**.

Tahapan berikutnya, seperti dimaklumi bersama, bahwa setelah penandatanganan Nota Kesepakatan tersebut, mekanisme Perubahan APBD TA 2019 untuk sementara waktu tidak berlanjut. Hal ini diantaranya karena DPRD Kabupaten Bungo periode 2014-2019 telah mendekati akhir masa tugas. Syukur alhamdulillah, berdasarkan surat Pimpinan DPRD Kabupaten Bungo periode 2019-2024, nomor 170/804/DPRD tanggal 16 September 2019, mekanisme Perubahan APBD TA 2019 kembali bergulir, dan dilanjutkan hingga hari ini.

Pimpinan dan Anggota Dewan Yang Terhormat, serta hadirin yang berbahagia.

Sebagai salah satu bagian dari dokumen perencanaan anggaran, Nota Kesepakatan KUPA tersebut di atas merupakan pedoman awal bagi pemerintah daerah dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2019, yang selanjutnya dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya, sehingga menghasilkan Nota Kesepakatan baru yakni

Nota Kesepakatan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2019.

Berdasarkan formulasi yang dilakukan terhadap lima kondisi yang menjadi latar belakang Perubahan APBD, serta memperhatikan kebutuhan dan dalam dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka postur anggaran yang termuat dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, dapat disampaikan secara garis besar sebagai berikut :

3. Anggaran Pendapatan semula sebesar Rp1,37 Triliyun lebih, direncanakan bertambah sejumlah Rp184 Milyar lebih sehingga menjadi Rp1,56 Triliyun lebih;
4. Anggaran Belanja semula sebesar Rp1,61 Triliyun lebih, direncanakan bertambah sejumlah Rp11,01 Milyar lebih sehingga menjadi Rp1,62 Triliyun lebih.

Penambahan anggaran pendapatan tersebut di atas, secara garis besar terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah direncanakan bertambah sejumlah Rp34,96 Milyar lebih;
2. Dana Perimbangan direncanakan bertambah sejumlah Rp133,10 Milyar lebih;
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah direncanakan bertambah sejumlah Rp16,17 Milyar lebih.

Berikutnya, penambahan anggaran belanja tersebut di atas, berasal dari pengurangan anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp8,39 Milyar lebih, dan penambahan anggaran belanja langsung sebesar Rp19,40 Milyar lebih. Secara garis besar rencana penambahan anggaran belanja tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

Pengurangan anggaran belanja tidak langsung sejumlah Rp8,39 Milyar lebih, terdiri dari :

1. Penggeseran anggaran belanja tidak terduga ke dalam anggaran belanja langsung pada kegiatan tertentu sejumlah Rp8,71 Milyar lebih, dan penggeseran anggaran belanja tidak terduga ke dalam anggaran belanja hibah sejumlah Rp321,53 juta lebih, untuk keperluan tahapan pelaksanaan pilkada KPUD Kabupaten Bungo dan Bawaslu Kabupaten Bungo di tahun 2019 berpedoman pada Surat Edaran Mendagri Nomor 900/9629/SJ tanggal 18 September 2019. Penggeseran anggaran tersebut telah dilakukan tiga kali, melalui mekanisme mendahului perubahan APBD, dimana sesuai aturan yang berlaku, hal tersebut dituangkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD TA 2019;
2. Penggeseran dalam anggaran belanja tidak langsung antar OPD guna penyesuaian alokasi anggaran Gaji dan Tunjangan serta Tambahan Penghasilan PNS (TPP), dimana setelah dilakukan evaluasi dan dihitung kembali ternyata terdapat beberapa OPD yang perlu disesuaikan kembali jumlah alokasi anggaran untuk itu.

Pimpinan dan Anggota Dewan Yang Terhormat, serta hadirin yang berbahagia.

Terhadap anggaran belanja langsung, direncanakan terdapat penambahan anggaran sejumlah Rp19,40 Milyar lebih, meliputi dua komponen besar, yakni :

1. Penambahan murni sejumlah Rp3,85 Milyar lebih, mengacu pada Berita Acara tertanggal 16 Agustus 2019 sebagaimana telah disebutkan di atas;
2. Penambahan yang berasal dari penggeseran anggaran belanja tidak terduga dan penggeseran dalam anggaran belanja langsung antar jenis, antar kegiatan dan antar OPD dalam rangka optimalisasi dan penyesuaian kebutuhan anggaran tahun berjalan, seluruhnya berjumlah Rp15,55 Milyar lebih;

Pimpinan dan Anggota Dewan Yang Terhormat, serta hadirin yang berbahagia.

Kemudian, untuk anggaran pembiayaan, terdapat perubahan pada angka SiLPA, semula diperkirakan SiLPA Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp237,98 Milyar lebih. Berdasarkan hasil audit BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi atas LKPD Kabupaten Bungo TA 2018, maka telah diperoleh angka SiLPA sebesar Rp64,74 Milyar lebih, terdiri dari :

- Sisa Dana Tidak Mengikat (Dana Umum) sebesar Rp28,94 Milyar lebih;
- Sisa Dana Mengikat (seperti DAK, DBH, DD, Pajak Rokok dan CHT serta Bantuan Keuangan Dari Provinsi) sebesar Rp25,16 Milyar lebih yang peruntukannya tidak bisa digunakan untuk program dan kegiatan lain; dan
- Kas di Bendahara penerima Organisasi Perangkat Daerah sebesar Rp10,63 Milyar lebih.

Pimpinan dan Anggota Dewan Yang Terhormat, serta hadirin yang berbahagia.

Pada kesempatan ini perlu juga disampaikan, bahwa sesuai Permendikbud Nomor 31 Tahun 2019 Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja tanggal 5 September 2019, Kabupaten Bungo memperoleh alokasi untuk pendanaan BOS Afirmasi SD dan SMP sebesar Rp18,1 Milyar lebih dan BOS Kinerja dari pusat sejumlah Rp1,65 Milyar lebih. Mengingat hingga saat ini belum diperoleh rincian atas belanja BOS tersebut, maka belum dimasukkan dalam dokumen rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2019 ini. Dengan demikian, penganggaran dalam Perubahan APBD ini akan dilakukan pada saat tahapan evaluasi oleh TAPD Provinsi Jambi, termasuk di dalamnya penyesuaian kembali beberapa komponen anggaran pendapatan dan belanja lainnya.

Pimpinan dan Anggota Dewan Yang Terhormat, serta hadirin yang berbahagia.

Berdasarkan persetujuan bersama antara Bupati Bungo dan DPRD Kabupaten Bungo terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2019 nantinya, tahapan berikutnya adalah evaluasi oleh Gubernur dalam rangka penyempurnaan lebih lanjut. Hal tersebut berpedoman pada ketentuan Pasal 314, Pasal 315 dan Pasal 319 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan diperkuat dengan Permendagri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA. 2019.

Pimpinan dan Anggota Dewan Yang Terhormat, serta hadirin yang berbahagia.

Demikianlah gambaran umum mengenai rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2019. Merujuk pada ketentuan Pasal 317 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, hendaknya diperoleh persetujuan bersama dalam rapat paripurna terakhir sesuai jadwal yang telah ditetapkan, dan paling lambat 30 September 2019. Selanjutnya, perlu juga disampaikan, bahwa dalam waktu dekat kita sudah dihadapkan pada agenda penting tahunan, yakni pembahasan RAPBD TA. 2020, dimana paling lambat 30 November 2019 mesti diperoleh persetujuan bersama.

Dalam kaitan itu, belajar dari pengalaman yang baru saja berlalu, di masa yang akan datang hendaknya Pemerintah Daerah bersama DPRD memiliki Kalender Anggaran Bersama. Hal ini dikarenakan setiap tahun terdapat tiga agenda besar dalam siklus

pengelolaan keuangan daerah, yakni penyusunan dan penetapan APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Masing-masing agenda tersebut memiliki tahapan yang cukup panjang sesuai mekanisme yang berlaku. Dengan adanya Kalender Anggaran Bersama tersebut, diharapkan setiap tahapan dapat berjalan dengan baik sebagaimana mestinya.

Oleh karena itu perlu dibangun hubungan kerja yang lebih sinergis, saling menguatkan satu sama lain, sesuai kato adat **Bak Aur Dengan Tebing**. Selanjutnya, secara tegas dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan, bahwa **penyelenggara pemerintahan daerah adalah Kepala Daerah dan DPRD dibantu Perangkat Daerah**.

Pimpinan dan Anggota Dewan Yang Terhormat, serta hadirin yang berbahagia.

Akhirnya, pada kesempatan yang berbahagia ini, perlu disampaikan pula kepada Anggota Dewan Yang Terhormat, sekiranya dibutuhkan penjelasan dan tambahan informasi berkenaan dengan penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD ini, dipersilakan untuk mengundang OPD terkait diantaranya melalui forum Rapat Dengar Pendapat. Sebaliknya, Tim Anggaran Pemerintah Daerah bersama seluruh Kepala OPD telah diinstruksikan agar senantiasa siap untuk memberikan penjelasan maupun klarifikasi. Dengan demikian, diharapkan pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2019 ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya, sesuai kato adat **bulek aek dek pembuluh, bulek kato dek mufakat**.

Untuk itu, ke depan hendaknya kita **Langkah Serentak Limbai Seayun**, sesuai semboyan kito bersamo. Semua itu tidak lain untuk kemajuan Kabupaten Bungo, dan demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bungo, dalam bingkai **Bungo Maju dan Sejahtera**, sesuai pantun berikut ini.

Buah Cempedak Di Tepi Hutan

Dibawa Pulang Dibuak Gulai

Dukungan Anggota Dewan Selalu Diharapkan

Supaya Bungo Maju Sejahtera Dapat Tercapai

Nak duo pantun seiring.

Sebelum Fajar Sungguhlah Elok bertahjud

Terdengar Azan Ke Masjid Berduyun-duyun

Bungo Master Akan Dapat Terwujud

Bilo Kito Langkah Serentak Limbai Seayun

Demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Atas segala kekurangannya kami mohon maaf, serta atas segala perhatiannya tidak lupa kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah SWT meridhoi usaha dan kerja keras kita bersama.

Billahi Taufik Walhidayah,

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pimpinan Rapat: Terima kasih kepada Bupati Bungo yang telah menyampaikan Nota Pengantar Bupati Bungo atas Ranperda APBD Perubahan Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2019.

Pembawa Acara : **Penyerahan Nota Pengantar dari Bupati kepada Pimpinan DPRD** Kepada Yth Bupati Bungo dan Wakil Bupati Bungo serta Pimpinan DPRD dimohon menuju tempat yang telah ditentukan Kepada Yth Bupati Bungo dan Wakil Bupati Bungo serta Pimpinan DPRD dimohon kembali ketempat semula Acara di kembalikan kepada pimpinan rapat

Saudara Bupati, Wakil Bupati yang kami banggakan, Anggota Dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia.

Pada kesempatan ini kami mengajak kita semua untuk memberikan dukungan kepada Pemerintah Daerah agar dapat memenuhi target rencana penerimaan yang disusun dan merealisasikan program dan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Saudara Bupati, Wakil Bupati yang kami banggakan, Anggota Dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia.

Demikian Rapat Paripurna DPRD pada hari ini, sebelum acara ini di skor atas nama Pimpinan saya mengundang Anggota Dewan serta hadirin untuk hadir kembali diruangan ini pada Rapat Paripurna dengan Agenda Penyampaian Kata Akhir Fraksi yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 30 November 2019.

Akhirnya dengan mengucapkan “Alhamdulillahirrabbi’alamiin” Rapat Paripurna DPRD hari ini secara resmi saya skor, Semoga Allah SWT meridhoi semua niat dan usaha baik kita Bersama.

--- ketukan palu satu Kali ----

Sekian terima kasih.

Wabillahirtaufiq Walhidayah.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Pembawa Acara: Hadirin yang berbahagia demikian seluruh rangkaian acara pada hari ini terimakasih
Wabillahi taufik walhidayah,
Wassalamualaikum Wr Wb.

Muara Bungo, 27 November 2019

DPRD KABUPATEN BUNGO

Wakil Ketua,



JUMELWAN AGUZA, SM

DOKUMENTASI KEGIATAN



